

**HASIL PERUNDINGAN
DAN TAKE AWAY
COP25
MADRID**

Hasil Perundingan dan Take Away COP25 Madrid

Oleh: Anggalia Putri dan Nadia Hadad

Perundingan iklim antarnegara atau COP25 telah selesai dilangsungkan di Madrid, Spanyol pada 2-15 Desember 2019 kemarin. Karena alotnya perundingan, COP25 diperpanjang selama dua hari hingga hari Minggu, 15 Desember. Ada tiga ekspektasi besar terhadap COP25 Madrid, yaitu: 1) ada sinyal kuat dari COP maupun negara-negara *Parties*, khususnya negara-negara penghasil emisi terbesar (*major polluters*) untuk meningkatkan komitmen dan ambisi iklim mereka sesuai dengan target Paris Agreement pada 2020, 2) aturan main Paris Agreement diselesaikan, khususnya terkait mekanisme pasar dan non-pasar (*Article 6*) dengan menjunjung tinggi integritas lingkungan hidup dan hak asasi manusia, dan 3) ada komitmen pendanaan dari negara maju untuk membiayai kehilangan dan kerusakan yang dialami negara-negara paling rentan (*loss and damage*). Di tengah ekspektasi besar tersebut, banyak pihak mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap hasil perundingan iklim di Madrid, termasuk Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, karena ketiga hal di atas tidak tercapai.¹

Ambisi

Aktivitas manusia telah menyebabkan kenaikan suhu global sebesar 1 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri yang telah menyebabkan penggurunan, melelehnya es di kutub utara, serta peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim di seluruh dunia. Paris Agreement yang disepakati oleh negara-negara di dunia pada 2015 menetapkan target untuk menahan kenaikan suhu bumi hingga di bawah dua derajat Celcius dan lebih jauh menahannya hingga 1,5 derajat Celcius saja di atas tingkat pra-industri. Di atas itu, ekosistem, infrastruktur, perekonomian, dan masyarakat di seluruh belahan dunia akan menghadapi bahaya yang teramat besar, termasuk kenaikan air laut, peningkatan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrim dan bencana alam, hingga hilangnya ekosistem dan keanekaragaman hayati yang selama ini menopang hidup manusia. Krisis iklim juga diperkirakan akan memicu pengungsian besar-besaran di tingkat global yang dapat memicu krisis sosial dan politik.

Karena itulah, ambisi penurunan emisi global yang sesuai dengan target Paris Agreement sangat diperlukan. Pada 2020, negara-negara, termasuk Indonesia, diminta untuk mengkomunikasikan atau memperbarui komitmen dan ambisi penurunan emisi mereka. Dengan keluarnya laporan terbaru IPCC yang memperingatkan bahaya jika target Paris Agreement tidak tercapai, negara-negara harus segera meningkatkan ambisi dan komitmen iklim mereka. Saat ini, ambisi dan komitmen yang ada **sangat tidak memadai** untuk mencapai target Paris Agreement dan diperkirakan akan meningkatkan suhu bumi sebesar 3 hingga 4 derajat Celcius. Namun, pada COP25 di Madrid, tidak ada sinyal politik yang kuat bahwa negara-negara, khususnya yang menghasilkan emisi terbesar, akan meningkatkan ambisi mereka pada 2020. Secara global, trend yang ada justru sangat mengkhawatirkan. China, India, Brazil, dan Arab Saudi tidak memberikan indikasi sama sekali bahwa mereka akan meningkatkan ambisi iklim mereka.

¹ <https://www.dailymail.co.uk/news/article-7794043/UN-climate-talks-limp-finish-line-key-questions-left.html>

Australia telah menyatakan bahwa ia tidak akan meningkatkan ambisinya.² Sementara itu, Amerika Serikat sebagai pengemisi CO₂ terbesar kedua setelah China dengan kontribusi 16%³ terhadap emisi global justru telah memulai secara resmi proses untuk keluar dari Paris Agreement.

Terkait ambisi, teks keputusan COP25 memutuskan akan menyelenggarakan

“*roundtables*” pada COP26 di Glasgow Skotlandia dan COP27 untuk mengkaji implementasi dan ambisi upaya penurunan emisi pra-2020 dan menyusun laporan pada September 2020.⁴ Sementara itu, negosiasi terkait “*common timeframe*” NDC, apakah akan 5 tahunan (didukung negara berkembang) atau 10 tahunan (didukung negara maju), gagal disepakati di Madrid dan akan dilanjutkan di Bonn pada Juni 2020.⁵

Aturan Pasar Karbon dan Kerangka Kerja Sama Non-Pasar

Artikel 6 adalah isu terpanas dalam COP25 di Madrid. Pada Artikel 6 Paris Agreement, negara-negara dapat mengadakan kerja sama bilateral di mana pengurangan emisi di sebuah negara dapat “ditransfer” ke negara lain untuk mencapai komitmen iklim negara lain tersebut (Artikel 6.2). COP21 dan Paris Agreement juga mendirikan sebuah mekanisme pasar karbon internasional yang disebut sebagai *Sustainable Development Mechanism* (Artikel 6.4) di mana negara dan sektor privat dapat memperjualbelikan kredit pengurangan emisi. Paris Agreement juga mendirikan kerangka kerja sama “non-pasar” untuk mitigasi dan adaptasi (Artikel 6.8). Aturan “pasar karbon” ini ditargetkan selesai di Madrid. Namun, perundingan berjalan dengan sangat alot hingga detik terakhir sehingga tidak ada kesepakatan yang dicapai dan negosiasi akan diteruskan pada Juni 2020 di perundingan antarsesi di Bonn, Jerman serta COP26 di Glasgow, Skotlandia. Perundingan menemui jalan buntu karena beberapa negara yang juga penghasil emisi besar (*major polluters*) seperti Australia, Brazil, China dan India menginginkan agar aturan pasar karbon yang baru membolehkan mereka untuk membawa serta (*carryover*) kredit karbon (CER) dan unit emisi (AAU) yang mereka miliki dari mekanisme Protokol Kyoto. Hal ini akan sangat melemahkan ambisi yang ada secara global. Menurut Climate Analytics, potensi pelemahan ambisi global akibat *carryover* unit Protokol Kyoto dapat mencapai 25% dan meningkatkan suhu bumi sebesar 0,1 derajat.⁶ Draft teks yang ada saat ini akan

² <https://www.climatechangenews.com/2019/12/12/largest-countries-silent-world-seeks-action-climate/>

³ <https://www.ucsusa.org/resources/each-countrys-share-co2-emissions>

⁴ <https://www.carbonbrief.org/cop25-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-madrid>

⁵ <https://www.carbonbrief.org/cop25-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-madrid>

⁶ <https://www.carbonbrief.org/cop25-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-madrid>

memperbolehkan penggunaan *Certified Emission Reductions* (CERs) Protokol Kyoto di bawah rezim Paris Agreement, namun dengan batasan tanggal atau *vintage*, yang akan ditentukan kemudian.

Isu lain yang gagal disepakati adalah aturan akunting untuk menghindari penghitungan ganda pengurangan emisi atau “*double counting*” melalui sistem yang disebut “*corresponding adjustments*,” yang ditentang oleh Brazil. Namun, draft teks yang ada saat ini mengharuskan *corresponding adjustments* untuk diterapkan dalam seluruh perdagangan karbon di bawah mekanisme ini, kecuali pada periode “opt out” yang akan ditentukan kemudian. Pengecualian ini juga berpotensi untuk menciptakan celah hukum baru yang akan menimbulkan penghitungan ganda.⁷ Terkait ambisi, draft final Artikel 6.2 menyatakan bahwa untuk memastikan emisi memang benar-benar turun, negara-negara yang berpartisipasi dalam perdagangan karbon bilateral “diimbau dengan sangat” untuk membatalkan sebagian kredit pengurangan emisi yang diperdagangkannya sementara di draft final Artikel 6.4, dinyatakan bahwa setidaknya 2 persen dari offset yang diperdagangkan harus dibatalkan untuk mendukung pengurangan emisi global secara keseluruhan.⁸

Negara-negara dan sektor privat yang berpartisipasi dalam perdagangan karbon harus mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk membiayai adaptasi (*share of proceeds*). Namun, dalam draft teks final Artikel 6.2, negara-negara tidak diwajibkan untuk mengalokasikan hal tersebut melainkan hanya “diimbau dengan sangat” untuk mendukung adaptasi.

Kegagalan terbesar perundingan Artikel 6 adalah tentang hak asasi manusia, di mana referensi terhadap HAM serta safeguards dalam pelaksanaan dan pelaporan perdagangan karbon dihapus dari teks perundingan. Padahal, dalam Pembukaan Paris Agreement telah dinyatakan bahwa negara-negara harus menghormati HAM, hak atas kesehatan, hak masyarakat adat, masyarakat lokal, migran, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang-orang yang berada dalam situasi rentan, hak atas pembangunan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan antargenerasi ketika melakukan aksi untuk mengatasi perubahan iklim.

Loss and Damage

COP25 di Madrid tidak mengabdikan tuntutan kunci negara-negara yang paling rentan terhadap kerusakan yang ditimbulkan krisis iklim, contohnya negara-negara kepulauan kecil yang terancam musnah karena kenaikan air laut. Tuntutan kunci tersebut adalah pendanaan baru, adisional, dan dapat diprediksi untuk membiayai *loss and damage* yang mereka alami. Saat ini, dukungan dari negara-negara maju hanya meliputi dukungan pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas terhadap negara-negara berkembang dalam hal pengurangan emisi (mitigasi) dan adaptasi, tidak mencakup *loss and damage*.⁹

⁷ <https://www.carbonbrief.org/cop25-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-madrid>

⁸ <https://www.carbonbrief.org/cop25-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-madrid>

⁹ <https://www.carbonbrief.org/cop25-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-madrid>

Terkait Laut dan Lahan

Ada beberapa hal terkait laut dan lahan yang terjadi di Madrid, yaitu:¹⁰

- 39 negara berkomitmen untuk memasukkan laut ke dalam NDC mereka selanjutnya
- Keputusan COP25 meminta diselenggarakannya dialog terkait laut dan perubahan iklim serta dialog terkait lahan dan perubahan iklim pada sesi antara di Bonn Juni 2020 untuk mendiskusikan cara-cara memperkuat mitigasi dan adaptasi di dua sektor tersebut
- Diadakannya sesi gabungan IPCC dan UNEP untuk mensosialisasikan isi Laporan Khusus IPCC terkait Lahan dan Perubahan Iklim serta Laut dan Perubahan Iklim

Terkait Indonesia

- Dalam sesi Paviliun Indonesia di Madrid, Indonesia mengadakan *soft launching* Rencana Aksi Nasional Adaptasi hasil review dari RAN-API sebelumnya.
- Dalam pembukaan Paviliun, Wakil Ketua DPR RI menyatakan bahwa parlemen akan sepenuhnya mendukung upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia melalui dukungan legislasi dan anggaran.
- Pada 2020, Indonesia tidak diwajibkan oleh Paris Agreement untuk meningkatkan ambisinya, namun diwajibkan untuk mengkomunikasikan ulang atau meng-update NDC. Pemerintah Indonesia memberikan sinyal bahwa Indonesia akan merevisi NDC (telah melaksanakan kick-off revisi NDC di Indonesia) dan memperbaiki beberapa hal, di antaranya penguatan metodologi, namun tidak akan meningkatkan ambisi/target komitmen iklimnya.
- Dalam UNEP Emission Gap Report 2019, dinyatakan bahwa asesmen terhadap perkembangan pengurangan emisi di Indonesia – apakah on track atau tidak – tidak dapat dilakukan karena ketidakpastian yang sangat tinggi terkait emisi Indonesia dari sektor hutan dan lahan.

¹⁰ <https://www.carbonbrief.org/cop25-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-madrid>



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://www.twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id
